

BAB III

TATA KELOLA PROGRAM KARTU PRA-KERJA DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA *ONLINE* PADA TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, sejak diterbitkan pada tanggal 11 April 2020 hingga 15 Desember 2020, Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra-kerja telah menerbitkan kartu Pra-kerja sebanyak 11 gelombang. Dimana jumlah pesertanya tercatat sekitar 5,9 juta orang dengan total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 20 triliun. Yang mana dalam pelatihan tiap gelombangnya, peserta harus menyelesaikan pelatihan pertamanya sebelum batas pendaftaran pelatihan berakhir. Hal tersebut dikarenakan jika pelatihan pertama pada batas waktu itu belum selesai, maka peserta tidak akan memperoleh dana insentif sebesar Rp. 600.000 tiap bulan selama 4 bulan. Selain itu peserta yang tidak menyelesaikan pelatihan juga akan masuk kedalam daftar *blacklist* dan tidak dapat mendaftar Kartu Pra-kerja ini pada gelombang-gelombang berikutnya.¹

Dalam kaitannya dengan tata kelola Program Kartu Pra-kerja dalam Pemberitaan Media Massa *Online* Pada Tahun 2020, akan diuraikan kedalam 2 pembahasan. Dimana pembahasan tersebut berusaha memaparkan bagaimana tata kelola program ini jika diamati dari sisi kebermanfaatannya dan sisi kontra. Yangmana akan diuraikan sebagai berikut:

¹ Kompas.com, “Besok, Seluruh Pendaftaran Pelatihan Kartu Pra-kerja 2020 ditutup”, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/190100165/besok-seluruh-pendaftaran-pelatihan-kartu-prakerja-2020-ditutup?page=all> pada 12 Januari 2022

A. Manfaat dan Aksesibilitas Program Kartu Pra-kerja

Kartu Pra-kerja sebagai program peningkatan kompetensi tidak hanya bisa diikuti oleh *fresh graduate* ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan saja. Melainkan mereka para buruh, karyawan, dan pegawai juga diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan ini. Secara singkat, semua warga negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun dan tidak sedang sekolah atau kuliah, diperbolehkan mendaftar program dan memiliki kesempatan mendapat pelatihan.²

Sebagaimana dilansir dari harian [kompas.com](https://www.kompas.com) 13 April 2020 pada 13.02 WIB, diantara manfaat mengikuti Program Kartu pra-kerja adalah program ini memiliki beberapa pelatihan yang bisa diambil sesuai dengan minat peserta. Yangmana tujuan daripada pelatihannya adalah memberikan keterampilan kepada peserta agar dapat digunakan untuk kebutuhan industri ataupun berwirausaha. Dimana beberapa alternatif pelatihannya antara lain cara berjualan online, menjadi fotografer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menguasai aplikasi komputer, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, menjadi pelatih kebugaran, dan lain sebagainya.³

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari [kompas.com](https://www.kompas.com), dari gelombang 1 sampai 11 penerima Program Kartu Pra-kerja tercatat sebanyak

² Kompas.com, “7 Manfaat Pelatihan Kartu Pra-kerja, Sertifikat Hingga Insentif Bulanan” dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/15/114613571/7-manfaat-pelatihan-kartu-prakerja-sertifikat-hingga-insentif-bulanan?page=all> pada 12 Januari 2022

³ Kompas.com, “Keuntungan Ikut Kartu Pra-kerja: Bisa Gratis Kursus dan Dapat Uang Saku” dalam <https://money.kompas.com/read/2020/04/13/130236226/keuntungan-ikut-kartu-prakerja-bisa-gratis-kursus-dan-dapat-uang-saku?page=all> pada 12 Januari 2022

5.509.055 peserta. Namun, data ini tidak termasuk 478.619 peserta yang dicabut kepesertaannya karena ada pelanggaran ataupun ketidakpatuhan aturan pendaftaran Kartu Pra-kerja. Adapun data inklusivitas Program Kartu Pra-kerja, meliputi:

- a. 45 persen penerima adalah perempuan
- b. 9 persen penerima berpendidikan rendah, yaitu lulusan SD kebawah
- c. 5 persen penerima penyandang disabilitas
- d. 2 persen penerima berusia lebih dari 60 tahun
- e. 2 persen penerima berasal dari kabupaten tertinggal.

Yang mana data-data tersebut dihimpun dari data administratif dan survei evaluasi manajemen pelaksana Program Kartu Pra-kerja. ⁴

Mengenai peserta Program Kartu Pra-kerja, dari gelombang 1 hingga 11, jika dikalkulasikan, sebanyak 82 persen pesertanya mengaku tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Kemudian terkait wilayah sebaran, penerima program ini berasal dari 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dimana berdasarkan data yang dihimpun dari penyelenggara Pra-kerja, jumlah penerima dari wilayah tertinggal sebanyak 2 persen atau setara dengan 110 ribu peserta. Pada pendaftaran program Kartu pra-kerja 2020, provinsi dengan pendaftar paling sedikit meliputi Papua, Papua barat, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.⁵

⁴ Kompas.com, "Sudahkah Kartu prakerja Inklusif untuk Semua Orang? Berikut datanya", dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/01/083000565/sudahkah-kartu-prakerja-inklusif-untuk-semua-orang-berikut-datanya?page=all>, diakses 12 Januari 2022

⁵ *Ibid.*

Kemudian, terkait dengan proses seleksi penerimaan Program Kartu Pra-kerja, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang tidak lolos seleksi. Diantaranya yaitu:

1. Adanya ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
2. Kemungkinan peserta masuk kedalam daftar kelompok yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti Program Kartu Prakerja. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (5) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara nasional Indonesia;
 - e. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - f. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun bantuan upah gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).⁶

⁶ Kompas.com, "Gagal Lolos Seleksi Kartu Pra-kerja? Coba Lakukan Hal ini", dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/08/120300865/3-kali-gagal-lolos-seleksi-kartu-prakerja-coba-lakukan-hal-ini--?page=all>, diakses 12 Januari 2022

Bagi peserta Program Kartu Pra-kerja, untuk anggaran tahun 2020 akan menerima bantuan pelatihan sebesar Rp.1 juta. Bantuan untuk pelatihan diberikan secara non tunai dan akan diberikan sekali saja. Namun, bisa digunakan untuk mengikuti beberapa pelatihan. Kemudian, setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan memperoleh insentif Rp.600 ribu tiap bulan selama 6 bulan dan insentif survei dengan total 150 ribu. Insentif tersebut dapat digunakan untuk apa saja. Atau dengan kata lain untuk meringankan biaya yang sudah dihabiskan ketika mengikuti pelatihan. Seperti makan, transport, pulsa, ataupun untuk meringankan biaya selama mencari pekerjaan.⁷

A. Koridor Kontra Program Kartu Pra-kerja

Dalam perjalannya, Program Kartu Pra-kerja banyak menuai kontra dari berbagai pihak. Bahkan kritik mengenai program ini sudah banyak bermunculan sejak sebelum program ini resmi diimplementasikan. Pada awalnya pemerintah berencana untuk memberikan pelatihan secara langsung (*offline*). Dimana peserta akan memperoleh fasilitas pelatihan gratis dan ongkos selama mengikuti pelatihan. Namun dikarenakan situasi pandemi, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan program ini sebagai salah satu media penyalur bansos bagi masyarakat, khususnya korban PHK yang terdampak pandemi.

⁷ Tirto.id, “Manfaat Kartu Pra-kerja di prakerja.go.id: Dapat Uang dan Pelatihan”, dalam <https://tirto.id/manfaat-kartu-prakerja-di-prakerjagoid-dapat-uang-dan-pelatihan-eMJz> , diakses 13 Januari 2022

Anggaran sebesar Rp.20 triliun disalurkan untuk menjangkau 5,6 juta peserta Kartu Pra-kerja. Dimana masing-masing peserta memperoleh uang sebesar Rp. 3,55 juta yang digunakan sebagai biaya pelatihan online dan insentif pasca pelatihan. Namun, sebagian pihak merasa bahwasannya program ini tidak tepat sasaran dikarenakan yang lebih dibutuhkan adalah bantuan langsung tunai. Selain itu, tidak semua korban PHK di daerah yang menjadi sasaran utama dari program ini dimasa pandemi memiliki akses internet ataupun komputer, yang menjadi syarat pelatihan program ini. Sehingga, harusnya anggaran Rp. 20 triliun tersebut diberikan langsung saja kepada daerah. Karena pastinya daerah lebih mengetahui karakteristik penduduknya, sehingga penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Sebagaimana diungkapkan Aviliani anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam diskusi online di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2020 yang menyatakan bahwa:

“Padahal , mereka (daerah) lebih tau soal data penduduk dan karakteristiknya. Pusat tinggal awasi saja”⁸

Maka dari itu, banyak pihak menilai bahwa skema dari Program Kartu Pra-kerja ini sudah keliru sejak awal. Dimana pemerintah seharusnya tidak memaksakan peluncuran kartu ini di saat pandemi. Dikarenakan masyarakat dirasa tidak membutuhkan pelatihan ditengah pandemi. Melainkan memerlukan dana tunai untuk membeli bahan makanan untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi krisis. Sebagaimana diungkapkan Ekonom Indef Bhima

⁸ Tempo, “Polemik Kartu Pra-kerja, Jokowi Dinilai Kurang Mengandalkan Pemda” dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1337990/polemik-kartu-prakerja-jokowi-dinilai-kurang-mengandalkan-pemda/full&view=ok> diakses 12 Januari 2022

Yudhistira Adhinegara kepada CNNIndonesia.com pada Kamis 23 September 2020, yang menyatakan bahwa:

Program ini justru pemborosan. Ada dana birokrasi tambahan, padahal dana bisa dialihkan semua menjadi bantuan tunai. Hasilnya mana, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang program ini dipaksakan untuk dilaksanakan. Pemerintah hanya melaporkan jumlah peserta Kartu Pra-kerja. Masyarakat bukan butuh itu, publik butuh output atau hasil dari Program Kartu Pra-kerja.⁹

Selain itu, anggaran yang digelontorkan untuk pelatihan ini dirasa hanya menguntungkan *platform* penyediannya saja. Misalnya latihan yang disediakan oleh Skill Academy dari Ruangguru. Berdasar laporan pelaksanaan fase 1, *platform* ini menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima bansos pra-kerja. Sehingga apabila dana sebesar RP.5,6 triliun tersebut diserap, Ruangguru memiliki potensi memperoleh transaksi sebesar Rp. 3,8 triliun . memberikan kesempatan bagi sebuah perusahaan memperoleh transaksi hampir Rp. 4 triliun dalam hitungan minggu diatas penderitaan masyarakat terdampak bencana sangatlah tidak patut, serta mengusik rasa kemanusiaan, sebagaimana disampaikan Andri W. Kusuma selaku inisiator Prakerja.org dalam tirto.id yang menyatakan bahwa:

Yang diberi keuntungan seharusnya bukan platform penyedia, tetapi lembaga pelatihannya. Jika mengacu pada Perpres maka yang memberikan pelatihan itu mereka yang punya sertifikasi dari lembaga pelatihan, bukan platform penyediannya. Tidak semua konten yang ada di program prakerja pemerintah itu sesuai dengan karakter tiap daerah.¹⁰

⁹ CNNIndonesia, “Analisis Polemik Kartu prakerja dari Pelaksanaan Hingga Sayonara” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200924065621-532-550189/polemik-kartu-prakerja-dari-pelaksanaan-hingga-sayonara> diakses 12 Januari 2022

¹⁰ Tirto.id, “Prakerja.org, Cara lain Kritik Kejanggalan Program Kartu Prakerja” dalam <https://tirto.id/prakerjaorg-cara-lain-kritik-kejanggalan-program-kartu-prakerja-fuP3> diakses 12 Januari 2022

Sebagaimana dilansir oleh kumparanNEWS pada 18 Juni 2020, wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan 4 aspek yang menjadi permasalahan dari pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja. Diantaranya adalah:

1. Proses pendaftaran

Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi data pekerja yang terkena PHK yaitu berjumlah 1,7 juta orang. Para peserta tersebut masuk dalam whitelist program ini. Namun faktanya yang mendaftar secara daring dari whitelist tersebut hanya 143 ribu peserta. Sedangkan 9,4 juta pendaftar pada 3 gelombang bukanlah target yang disasar oleh program ini.

2. Kemitraan platform digital

Disebutkan bahwasannya proses kerja sama dengan delapan platform digital itu tidak melalui mekanisme Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). KPK melihat ada konflik kepentingan dalam lima Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP). Konflik kepentingan tersebut terjadi dikarenakan beberapa platform terafiliasi dengan LPP. Sementara secara mekanisme, LPP mengajukan program ke platform untuk kemudian dikurasi oleh Platform dengan *Project Management Office* (PMO). Sementara LPP dan platform masih ada afiliasi, karena satu perusahaan.

3. Materi pelatihan

KPK menilai bahwasannya kurasi materi pelatihan program ini tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari total

1.895 pelatihan. Sejumlah materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. KPK mengambil sampel 327 pelatihan dari 1.895 pelatihan. Berdasarkan penelusuran sampel tersebut, 89% pelatihan tersedia di internet secara gratis, termasuk di laman prakerja.org

4. Metode pelaksanaan program pelatihan

KPK menyebutkan bahwa pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan yang dilaksanakan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.¹¹

Terlepas dari besarnya dana pelatihan yang digelontorkan oleh pemerintah untuk Program Kartu Pra-kerja ini, ada beberapa aspek yang menjadi catatan dalam pelaksanaan program sebagaimana dilansir oleh *the conversation* pada 7 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa:

1. Peserta tidak diarahkan ke industri unggulan

Sebelum menawarkan pelatihan ke peserta program, pemerintah tidak mengumumkan industri spesifik apa yang menjadi unggulan Indonesia, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Apakah itu sektor manufaktur, perdagangan, maupun jasa. Hal ini mengakibatkan peserta menentukan sendiri program pelatihan yang ingin diikuti, tanpa mengetahui industri apa yang akan dikembangkan dan keahlian apa yang diperlukan oleh industri tersebut.

¹¹ KumparanNEWS, “Polemik kartu Pra-kerja yang ditemukan KPK”, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/polemik-kartu-prakerja-yang-ditemukan-kpk-1te1GOD88mK/2>, diakses 12 Januari 2022

2. Tidak memberikan informasi kepada peserta mengenai keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri potensial.

Peserta Pra-kerja diberikan kebebasan untuk memilih jenis pelatihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan informasi yang dimiliki pekerja. Padahal, perkembangan teknologi telah mengubah jenis keterampilan yang diharapkan di pasar tenaga kerja. Dengan kebebasan yang diberikan ini, bisa saja pelatihan yang dikehendaki oleh peserta bukan jenis keterampilan yang dicari ataupun dibutuhkan di pasar tenaga kerja, sehingga peserta tetap akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

3. Desain dan konten pelatihan belum memberikan jaminan terpenuhinya keterampilan yang dibutuhkan

Diamati dari judul-judul pelatihan yang banyak dibeli dan desain pelatihan yang memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih, sangat mungkin peserta memilih keahlian yang sebenarnya sudah dikuasai sebelumnya. Apabila peserta melakukan hal demikian, maka tujuan daripada program ini yaitu agar pesertanya dapat memperoleh keahlian baru, meningkatkan keterampilan di bidang yang sudah ditekuni, ataupun beralih bidang yang baru akan sulit dicapai.¹²

Dengan berbagai permasalahan diatas, kemampuan daripada Program Kartu Pra-kerja dalam memberikan bekal kompetensi kepada peserta dengan keahlian yang relevan untuk meningkatkan kemampuannya perlu

¹² The Conversation, "Tiga Sebab Mengapa kartu Pra-kerja Tidak Efektif Atasi Pengangguran dan Solusinya", dalam <https://theconversation.com/tiga-sebab-mengapa-kartu-prakerja-tidak-efektif-atasi-pengangguran-dan-solusinya-142998>, diakses 13 Januari 2022

dipertanyakan. Perlu adanya mekanisme untuk mengukur tingkat efektivitas Program Kartu Pra-kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dimana efektivitas tersebut tidak akan diketahui tanpa ada pengawasan terhadap program. Sebagaimana diungkapkan oleh Donald L. Kirkpatrick ahli manajemen asal Amerika, ada 4 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas program pelatihan. Diantaranya yaitu: sejauh mana reaksi peserta, pembelajaran yang di dapatkan peserta, perubahan perilaku peserta, dan yang terakhir adalah hasil akhir daripada pelatihan tersebut.¹³

¹³ *Ibid.*